

## Jurnal Ekonomi dan Bisnis

[www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi](http://www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi)

### DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Tuti' Nadhifah<sup>1</sup> Muhammad Ghafur Wibowo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Ekonomi Syariah FEBI UIN Sunan Kalijaga  
evanadhifah96@gmail.com<sup>1</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Article history:

Received: 01 March 2021

Received in revised form:

25 March 2021

Accepted: 25 March 2021

Available online: 31 March 2021

**Keywords:** Inequality of  
Community Income, Economic  
Growth, Total Population,  
Number of Workers, Covert  
Unemployment Rate

#### ABSTRACT

*Income inequality is a problem related to income earned by people in an area between groups. The problem of inequality is very important to be studied, because it can affect the regional economy. This research was conducted with the aim of finding the factors that influence income inequality. This research is a descriptive study with a quantitative approach. The data in this study were 5 (five) provinces in the Special Region of Yogyakarta. The year period used is 2013-2019. This research method use Panel Data Regression. The results of this study indicate that the variables of economic growth and population do not have a positive and significant effect on income inequality. While the variable number of workers has a negative and significant effect on income inequality, besides that the hidden unemployment rate also has a positive and significant effect on income inequality. This research has implications for the theory of income inequality and the policies taken to deal with inequality by paying attention to the number of workers and the hidden unemployment rate in the Special Region of Yogyakarta for the period 2013-2019.*

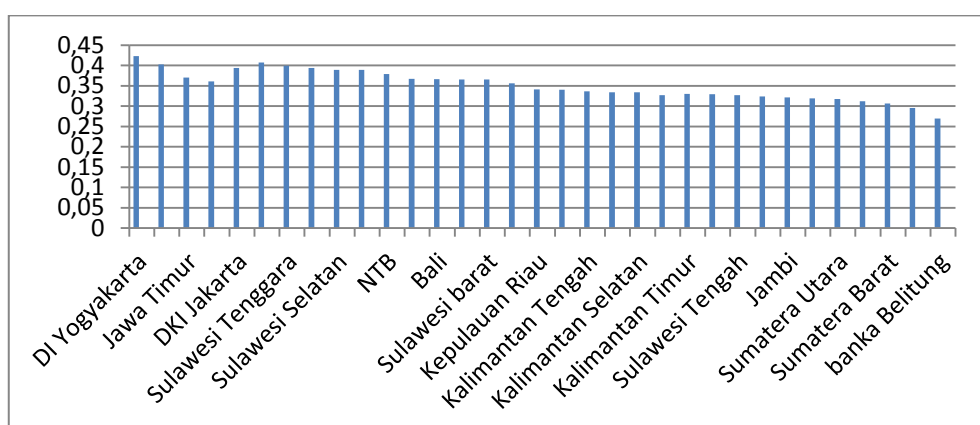
#### PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi selalu menjadi perhatian di berbagai daerah, karena pembangunan ekonomi adalah tolok ukur untuk melihat perkembangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat melalui pengembangan perekonomian. Todaro dan Smith (2003) juga menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya pembangunan ekonomi yaitu untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Namun, pembangunan ekonomi daerah pada umumnya lebih konsen pada pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran dan kurang melihat pada ketimpangan pendapatan. Menurut Tambunan (2001) permasalahan yang sering dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah permasalahan ketidaksetaraan atau ketimpangan pendapatan masyarakat. Selain itu permasalahan ketimpangan pendapatan masyarakat juga merupakan isu penting yang harus diperhatikan dan dikaji, khususnya bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam menyejahterakan masyarakat (Kalalo, 2016).

Salah satu daerah yang memiliki permasalahan ketimpangan pendapatan adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Walaupun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari

pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintah, namun tidak berarti Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki permasalahan mengenai ketimpangan pendapatan masyarakat. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) menyatakan bahwa daerah yang memiliki ketimpangan tertinggi per juli 2019 berdasarkan nilai rasio gini ada delapan provinsi dan salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketimpangan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebesar 0,423, kemudian daerah Gorontalo sebesar 0,407, Jawa Barat sebesar 0,402, Sulawesi Tenggara sebesar 0,399, DKI Jakarta sebesar 0,394, Papua sebesar 0,394, Sulawesi Selatan sebesar 0,389, dan Papua Barat yaitu sebesar 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka ketimpangan tertinggi di Indonesia pada tahun 2019. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Data diolah, 2019.

**Gambar 1. Rasio Gini Pada Daerah Dengan Ketimpangan Tertinggi Per Juli 2019**

Tingginya ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta menurut kepala Suhariyanto badan Pusat Statistik yang dikutip dari Kompas.com yaitu dikarenakan pengeluaran pada kelompok lapisan bawah atau masyarakat yang berpenghasilan rendah lebih cepat dari pada kelompok atas atau masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Hal tersebut diperkuat dengan data BPS (2019) bahwa pengeluaran pada golongan bawah hanya menikmati 15,26%, golongan menengah 34,50% dan golongan pengeluaran kaya yaitu sebesar 50,24%.

Ketimpangan pendapatan dapat diukur, umumnya alat yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan di berbagai daerah adalah menggunakan rasio gini (Todaro dan Smith, 2003). Cara untuk mengukur ketimpangan pendapatan pada suatu daerah dan salah satunya di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah dengan menggunakan rasio gini yang dilihat dari nilainya antara 0 dan 1. Apabila rasio gini semakin mendekati nilai 1 artinya ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin tinggi, sedangkan apabila rasio gini menunjukkan nilai 0 artinya pendapatan masyarakat telah merata.

Terjadinya ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta di sebabkan atau di pengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti pertumbuhan ekonomi. Seperti yang dijelaskan oleh Todaro dan Smith (2006) juga menjelaskan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka akan berimbas pula pada semakin luasnya ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dan begitu pula sebaliknya.

Menurut Todaro dan Smith (2006) selain pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk juga memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018), Matondang (2018) menunjukkan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja juga dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila terjadi ketidakmerataan terhadap jumlah tenaga kerja di suatu daerah, akan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Arif dan Wicaksani (2017) juga menjelaskan terkait masalah jumlah tenaga kerja bahwa apabila jumlah tenaga kerja meningkat, maka akan diiringi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dalam suatu daerah pula. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Adipuryanti dan Sudibia (2015), Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018) yang menemukan bahwa penduduk yang bekerja atau tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Kemudian di samping pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan produktivitas tenaga kerja, faktor lain yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat pengangguran terselubung. Hal ini dikarenakan pengangguran terselubung memiliki keterkaitan terhadap angka kemiskinan dan berhubungan juga dengan pendapatan rumah tangga yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari (Sugiyarto, Oey-Gardiner, & Triaswati, 2006). Menurut Teka, Woldu dan Fre (2019) pendapatan rumah tangga yang rendah memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan masyarakat adalah menjadi sebuah persoalan yang kompleks karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari tingginya angka ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta belum mampu memperbaiki kondisi ketimpangan pendapatan masyarakat. Tingginya angka ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta menempati peringkat pertama dibandingkan dengan daerah-daerah lain se-Indonesia.

Selain itu pada penelitian ini juga memiliki perbedaan atau pembaharuan dengan penelitian sebelumnya, yaitu pada variabel independen yang menambahkan tingkat pengangguran terselubung sebagai faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal ini dilakukan karena adanya masalah yang merujuk dari penelitian Damarjati (2010) bahwa seseorang yang bekerja tidak teratur atau part time memiliki hubungan terhadap ketimpangan. Part time disini kalau menurut Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk dalam pengangguran terselubung.

Hal ini menjadi lebih menarik untuk dikaji terkait faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Berkaitan dengan permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "DETERMINAN KETIMPANGAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA".

## **MATERI DAN METODE PENELITIAN**

### **Ketimpangan pendapatan**

Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018) bahwa ketimpangan pendapatan adalah sebuah permasalahan yang berhubungan dengan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada suatu daerah pada antar golongan. Ketimpangan tersebut digolongkan ke dalam 40%

golongan masyarakat berpenghasilan rendah, 40% golongan masyarakat berpenghasilan sedang, serta 20% golongan masyarakat berpenghasilan tinggi (Sastra, 2017).

Ketimpangan pendapatan dapat diukur, alat ukur yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat. Menurut Dumairy (1996) tolok ukur ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan dapat menggunakan 2 tolok ukur yaitu seperti menggunakan Bank Dunia, Rasio Gini.

### **Pertumbuhan ekonomi**

Mankiw (2003) yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah cara yang dapat digunakan untuk melihat sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu atau tidak. Namun, pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap tingginya ketimpangan pada suatu daerah. Permasalahan ini menjadi hal yang sangat serius dan perlu pengkajian lebih dalam, banyak daerah yang pertumbuhan ekonominya meningkat akan tetapi tidak sejalan dengan pemerataan pendapatan.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam Hipotesis Kuznets bahwa ketika pertumbuhan ekonomi pada tahap awal, distribusi pendapatan cenderung akan menunjukkan tidak baik atau tidak merata. Namun, untuk tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan menunjukkan keadaan yang membaik atau lebih merata, hal tersebut di kenal dengan Kurva Kuznets “U-terbalik” (Todaro dan Smith, 2006). Dengan begitu dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi sejatinya tidak selalu serta merta diikuti oleh pemerataan.

### **Jumlah Penduduk**

Menurut Said (2001) pengertian jumlah penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal pada suatu wilayah. Lindhiarta (2014) menambahi bahwa jumlah penduduk adalah total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangnan waktu tertentu. Dengan demikian jumlah penduduk merupakan jumlah keseluruhan orang atau penduduk yang menetap pada suatu wilayah atau daerah. Namun, jumlah penduduk yang terlalu padat pada suatu wilayah atau daerah selalu menjadi permasalahan dalam pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan pada umumnya tingginya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah akan diikuti dengan angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi pula.

Menurut Sukirno (2006) terjadinya permasalahan jumlah penduduk akan menghambat pembangunan ekonomi seperti ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi juga akan menyebabkan ketidakmerataan yang lebih lebar mengenai pendapatan beberapa golongan masyarakat.

### **Jumlah tenaga kerja**

Undang-Undang tentang ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tenaga kerja merupakan orang yang bekerja baik di dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun, jumlah tenaga kerja dapat menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan masyarakat. Arif dan Wicaksani (2017) menjelaskan terkait masalah jumlah

tenaga kerja bahwa jika terjadi peningkatan pada jumlah tenaga kerja dalam suatu daerah, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga terjadi peningkatan. Padahal, pertumbuhan ekonomi yang meningkat belum tentu membuat pembangunan ekonomi menjadi berhasil. Justru sebaliknya pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak pada ketimpangan dan ketidakmerataan pendapatan.

### **Tingkat pengangguran terselubung**

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) pengangguran terselubung adalah pekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan. Terjadinya pengangguran terselubung diakibatkan oleh ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan pada tenaga kerja. Hal ini juga dibahas dalam penelitian Damarjati (2010) bahwa seseorang yang bekerja tidak teratur atau *part time* memiliki hubungan terhadap ketimpangan. *Part time* disini kalau menurut Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk dalam pengangguran terselubung. Selain itu, Pengangguran terselubung juga terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja yang di pakai untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang melebihi batas optimalnya.

### **Metode penelitian**

Dalam penelitian ini mengambil sampel dari data Instansi BPS (Badan Pusat Statistik). Data yang diambil adalah data tentang pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran terselubung dan ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Terdapat 5 Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo, Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang merupakan gabungan dari *time series* dan *cross section* (Ghozi dan Hermansyah, 2018). Menurut Baltagi (2005) dengan menggabungkan *time series* dan *cross section* data panel memberikan data yang lebih informatif dan dapat mengurangi bias. Sedangkan Alat yang digunakan untuk analisis data dengan metode statistik dalam penelitian ini yaitu menggunakan *Eviews 9*. Adapun model persamaan regresi data panel adalah sebagai berikut (Gujarati, 2013 :134):

$$YIG = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 JP + \beta_3 JTK + \beta_4 TPT$$

Dimana:

**IG** : Indeks Gini

**PE** : Pertumbuhan Ekonomi

**JP** : Jumlah Penduduk

**JTK** : Jumlah Tenaga Kerja

**TPT** : Tingkat Pengangguran Terselubung

**$\alpha$**  : Koefisien

**$\beta$**  : Konstanta

Model di atas bertujuan untuk melihat elastisitas pada perubahan variabel terhadap variabel independen ke variabel dependen. Metode estimasi akan dilakukan dengan data panel dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu sebagai berikut:

1. Metode *Common Effect*

Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dalam mengestimasi regresi data panel (Juanda dan Junaidi, 2012 : 180). Dalam mengestimasi nya maka diasumsikan bahwa setiap unit individu tidak ada perbedaan pada dimensi kurun waktu. Dengan kata lain regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu (Juanda dan Junaidi, 2012, 180).

2. Metode *Fixed Effect*

Pada metode *Fixed Effect* menjelaskan bahwa antara individu memiliki perbedaan, karena menurut Juanda dan Junaidi (2012 : 180) setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Menurut Yamin, Rachmah dan Kurniawan (2011 : 200) individu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda yaitu dengan koefisien yang tetap pada waktu ke waktu.

3. Metode *Random Effect*

Metode ini berbeda dengan *Fixed Effect* dan *Common-Constant*, metode ini tidak lagi dianggap konstan, namun metode ini dianggap berubah *random* dari suatu nilai rata-rata (Juanda dan Junaidi, 2012 : 181).

Untuk memilih model mana yang paling tepat, maka perlu dilakukan beberapa pengujian yang harus dilakukan antara lain yaitu:

1. Uji spesifik model

a. Uji Chow

Uji ini biasanya digunakan untuk memilih model yang terbaik yaitu antara model *Common Effect* dan model *Fixed Effect* (FEM). Pada uji chow apabila nilai probabilitas adalah kurang dari 5% (0,05), maka model yang tepat untuk digunakan adalah model *fixed effect*. Begitu pula sebaliknya jika nilai probabilitas lebih dari 5% (0,05) maka model yang tepat digunakan adalah model *common effect*.

b. Uji LM (*Langrange Multiplier*)

Pada uji ini digunakan untuk melihat uji yang terbaik antara model *Random Effect* dan *Common Effect*. Hal ini dilihat dari nilai pada uji LM statistiknya, apabila nilai statistik *Chi-Squarenya* lebih besar maka hipotesisnya ditolak. Oleh karena itu model yang tepat untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Begitu juga sebaliknya jika nilai statistik *Chi-Squarenya* lebih kecil maka hipotesisnya diterima, yang artinya model yang tepat untuk digunakan adalah *Common Effect* (Widarjono, 2016).

c. Uji Hausman

Penggunaan uji ini sama dengan uji *Likelihood ratio* yaitu untuk memilih model yang terbaik yaitu antara model *fixed effect* dan model *random effect*. Pada uji hausman apabila nilai statistiknya lebih besar dari Chi Square atau nilai probabilitas (p-Value) lebih kecil dari tingkat kritis  $\alpha$  maka  $H_0$  ditolak. Jika  $H_0$  ditolak maka model yang tepat untuk digunakan adalah model *fixed effect*.

2. Uji statistik

a. Uji F

F-tes digunakan sebagai alat uji untuk melihat pengaruh secara bersamaan atau secara simultan, yaitu jika  $P > 5\%$  menunjukkan bahwa hipotesis  $H_0$  diterima. Begitu pula

sebaliknya jika sebaliknya  $P < 5\%$  menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak.

b. Uji T

T-test berfungsi sebagai alat uji untuk melihat pengaruh secara parsial. Maka jika  $P > 5\%$  menunjukkan bahwa hipotesis pada  $H_0$  diterima, sedangkan  $H_a$  di tolak. Sedangkan jika  $P < 5\%$  menunjukkan bahwa hipotesis pada  $H_0$  ditolak, sedangkan  $H_a$  di terima (Ghazali, 2005 : 299).

3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji ini digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen. Pada pengujian tersebut untuk menghindari bias maka nilai yang digunakan adalah  $R^2$ . Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka semakin cocok suatu garis regresi. Begitupun sebaliknya jika semakin kecil nilai koefisien determinasi maka semakin tidak tepat garis regresi dalam mewakili hasil observasi (Ghazali, 2005 : 83).

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan model estimasi yang terpilih dalam penelitian ini adalah model *Random Effect Model* (REM). Hasil dari estimasi *Random Effect Model* (CEM) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat, selain itu tingkat pengangguran terselubung juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Berikut adalah hasil uji T dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 1. Hasil Uji T**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | 0.380269    | 0.036218   | 10.49955    | 0.0000 |
| PE       | 0.001714    | 0.005053   | 0.339200    | 0.7368 |
| JP       | 4.82E-08    | 5.40E-08   | 0.892537    | 0.3792 |
| JTK      | -2.04E-07   | 8.95E-08   | -2.283851   | 0.0296 |
| TPT      | 1.93E-07    | 4.27E-08   | 4.528673    | 0.0001 |

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2020.

Uji F juga digunakan sebagai alat uji untuk melihat pengaruh secara bersamaan atau secara simultan. Berikut adalah hasil uji F dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 2. Hasil Uji F**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| F-statistic       | 5.417298 |
| Prob(F-statistic) | 0.002095 |

Sampel: Data diolah oleh peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa nilai probabilitas F statistiknya adalah  $0.002095 < 5\%$  (0,05) artinya bahwa ( $H_0$ ) ditolak dan ( $H_a$ ) diterima. Hasil dari uji F menjelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran terselubung secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat yang dinyatakan dengan rasio gini.

Selain itu uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) di lakukan juga guna untuk mengukur seberapa besar variabel independen memengaruhi variabel dependen. Berikut adalah hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Adjusted R-aquared | 0.341968 |
|--------------------|----------|

Sampel: Data diolah oleh peneliti.

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa nilai dari hasil uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) adalah 0.341968. Hal ini menjelaskan bahwa pengaruh variabel independen terhadap dependen adalah sebesar 34% dan sisanya 66% dipengaruhi oleh variabel lain.

Analisis regresi yang telah dilakukan bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Faktor yang mempengaruhi meliputi jumlah penduduk, jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran terselubung. Berikut ini merupakan tabel yang dirangkum mengenai hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, , maka hasil yang diperoleh dari yaitu:

**Tabel 4. Hasil Regresi Data Panel**

| Variabel           | Coefficient | Probabilitas | Keterangan       |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| C                  | 0.380269    | 0.0000       | -                |
| PE                 | 0.001714    | 0.7368       | Tidak Signifikan |
| JP                 | 4.82E-08    | 0.3792       | Tidak Signifikan |
| JTN                | -2.04E-07   | 0.0296       | Signifikan       |
| TPT                | 1.93E-07    | 0.0001       | Signifikan       |
| Adjusted R-aquared |             | 0.341968     |                  |
| F-statistic        |             | 5.417298     |                  |
| Prob (F-statistic) |             | 0.002095     |                  |

Sumber: Data telah diolah peneliti, 2020.

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil output dari oleh data menggunakan metode regresi data panel adalah nilai dari koefisien konstanta sebesar 0.380269. Artinya bahwa nilai dari indeks gini adalah sebesar 0.380269. Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai pengaruh pada setiap variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebagai berikut:

### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PE (pertumbuhan ekonomi) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil pengujian yang menghasilkan nilai signifikan  $> 5\%$  (0,05) dengan nilai probabilitas sebesar 0.7368. Hasil dari penelitian ini mengartikan bahwa apabila pertumbuhan naik, maka angka ketimpangan pendapatan tidak ikut mengalami kenaikan.

Hasil pengujian ini menolak hipotesis  $H_1$  yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode

tahun 2013-2019. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan teori Chapra (2000), Todaro dan Smith (2003) diatas yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga bertentangan dengan penelitian terdahulu yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat (Amri, 2017; Pauzi dan Dewa, 2016; Dando, Benu & Mangginsela, 2019).

Meskipun begitu, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Kim (2016) yang menunjukkan bahwa di saat nilai pertumbuhan ekonomi menunjukkan penurunan, nilai ketimpangan pendapatan tetap mengalami peningkatan. Kim (2016) juga menambahi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan tingginya angka ketimpangan pendapatan justru lebih berimbas pada melambannya pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian hasil dari penelitian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi tidak memengaruhi dan bukan salah satu faktor yang dapat memengaruhi angka ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019 tidak hanya dinikmati oleh sebagian golongan saja. Dimana aktivitas ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019 sudah dimanfaatkan dengan baik salah satunya dipelopori oleh lapangan usaha konstruksi, informasi dan komunikasi, industri pengelolaan serta penyediaan akomodasi dan makan minum. Selain itu pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta juga yang makin baik dilihat dari terjaganya stabilitas keuangan daerah DIY yang tercermin dari sektor korporasi dan rumah tangga yang masih kuat (BPS, 2019).

Hal ini dikuatkan dengan teori Kuznets yang menjelaskan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi pada tahun awal maka distribusi pendapatan akan cenderung menunjukkan tidak baik atau tidak merata. Namun, untuk tahap selanjutnya distribusi pendapatan akan menunjukkan keadaan yang membaik atau lebih merata (Todaro dan Smith, 2006).

## **2. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel JP (jumlah penduduk) tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $> 5\%$  (0,05) dengan nilai probabilitas sebesar 0.3792. Hasil tersebut mengartikan bahwa variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hipotesis  $H_2$  dan hasil dari penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Matondang (2018), Faizah (2018), Damanik, Ulgani dan Rosmeli (2018) yang menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat, artinya tingginya jumlah penduduk akan diikuti dengan semakin lebarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah. Selain itu. Hasil penelitian ini juga bertentangan dengan teori dari Arsyad (2010) dan Sukirno (2006) yang menyatakan bahwa Jumlah penduduk merupakan salah satu penyebab tingginya angka ketimpangan pendapatan pada suatu daerah.

Namun, hasil dari penelitian ini mendukung dan selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Hartandi (2018) bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh

terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.

Dengan demikian bahwa jumlah penduduk yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena naiknya jumlah penduduk juga diiringi dengan produktivitas penduduk. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang menunjukkan bahwa angka pengangguran di DIY setiap tahunnya mengalami penurunan ([bappeda.jogjapro.go.id](http://bappeda.jogjapro.go.id)). Jadi, dapat diartikan bahwa jumlah penduduk yang naik diimbangi dengan naiknya angkatan kerja dan akan berdampak terhadap naiknya pendapatan dan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah penduduk naik, seseorang dapat meningkatkan produktivitas dan harus dibarengi dengan perekonomian yang stabil. Oleh karena itu dengan naiknya jumlah penduduk perlu cepat untuk ditangani oleh pemerintah agar tidak menimbulkan permasalahan yang sifatnya ekonomi seperti ketidaksetaraan atau ketimpangan.

### **3. Pengaruh Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel JTK (jumlah tenaga kerja) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan  $< 5\%$  (0,05) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0296 dan nilai koefisien sebesar  $-2.04E-07$ , ini berarti jika setiap kenaikan JTK (jumlah tenaga kerja) 1 orang, maka akan menurunkan ketimpangan pendapatan sebesar  $-2.04E-07$  persen.

Hasil uji hipotesis ini menolak dari hasil penelitian sebelumnya yaitu dari Arif dan Wicaksani (2018) yang menemukan bahwa jumlah tenaga kerja tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun, hasil penelitian ini mendukung dan selaras dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Adipuryanti dan Sudibia (2015) yang menemukan bahwa jumlah tenaga kerja memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil tersebut mengartikan bahwa angka jumlah tenaga kerja yang naik akan dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah. Hasil dalam penelitian ini menerima hipotesis  $H_3$  yaitu jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat. Hasil penelitian ini juga membuktikan bahwa JTK (jumlah tenaga kerja) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019.

Hal ini disebabkan karena pertambahan jumlah tenaga kerja di Daerah istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019 diimbangi dengan kesempatan kerja yang tinggi, karena DIY merupakan salah satu daerah yang memiliki kerajinan tangan dan industri pariwisata terbesar yang menempati peringkat ke 2 setelah Bali ([Kumparan.com](http://Kumparan.com)). Selain itu, masifnya pembangunan infrastruktur di DIY dan prospek pariwisata dengan dibukanya Yogyakarta Internasional Airport mendorong penyerapan tenaga kerja pada beberapa lapangan usaha. Berdasarkan peningkatan tenaga kerja akan memberikan dampak pada perbaikan penghasilan yang diterima masyarakat DIY (BPS, 2019).

Hal tersebut di perkuat dengan teori Mankiw (2013) bahwa bahwa pergeseran permintaan tenaga kerja, ketika permintaan tenaga kerja naik maka keseimbangan upah naik dan jumlah tenaga kerja juga ikut. Hal ini menunjukkan bahwa apabila permintaan produksi

naik maka harga output akan ikut naik, sehingga akan memengaruhi juga pada penambahan tenaga kerja dan diikuti dengan tingkat upah yang naik.

Oleh karena itu penyerapan tenaga kerja dan dapat memberdayakan masyarakat yang akan berdampak terhadap pendapatan masyarakat. Kemudian pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan menyebabkan permintaan barang dan jasa menjadi lebih besar, sehingga mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak lagi dan seterusnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi akan berjalan dengan baik dan ketimpangan akan menurun.

#### **4. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terselubung Terhadap Ketimpangan Pendapatan Masyarakat**

Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel TPT (tingkat pengangguran terselubung) memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar  $< 5\%$  (0,05) dengan nilai probabilitas sebesar 0.0001 dan nilai koefisien sebesar  $1.93E-07$ , ini berarti jika setiap kenaikan TPT (tingkat pengangguran terselubung) 1 orang, maka akan menaikkan ketimpangan pendapatan sebesar  $1.93E-07$  persen.

Hasil tersebut mengartikan bahwa setiap kenaikan TPT (tingkat pengangguran terselubung) akan diikuti dengan naiknya ketimpangan pendapatan dan juga PTP (tingkat pengangguran terselubung) merupakan salah satu faktor yang dapat semakin memperlebar ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hasil dalam penelitian ini menerima hipotesis  $H_4$  yaitu tingkat TPT (tingkat pengangguran terselubung) berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat.

Penelitian ini membuktikan bahwa TPT (tingkat pengangguran terselubung) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal ini disebabkan oleh tingkat pengangguran terselubung menunjukkan angka yang lebih tinggi dari pada pengangguran terbuka dan setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan secara fluktuatif ([bappeda.jogjapro.go.id](http://bappeda.jogjapro.go.id)). Naiknya pengangguran terselubung karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal yang disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya. Menurut Alam (2007) ketidakcocokan pekerjaan dengan bakat dan kemampuannya dapat memengaruhi output yang rendah.

Tingginya tingkat pengangguran terselubung menunjukkan bahwa masyarakat miskin atau belum sejahtera di DIY masih dikategorikan cukup tinggi. Selain itu naiknya tingkat pengangguran terselubung menunjukkan bahwa nilai dari pendapatan rumah tangga rendah dan belum dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan Sugiyarto, Oey-Gardiner & Triaswati (2006) bahwa pengangguran terselubung memiliki keterkaitan terhadap angka kemiskinan dan berhubungan juga dengan pendapatan rumah tangga yang tidak berbanding lurus dengan kebutuhan sehari-hari.

Dengan demikian apabila tingkat pengangguran terselubung semakin tinggi, berarti menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat rendah dan belum dapat memenuhi kebutuhan, yang artinya belum dikatakan sejahtera. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Teka, Woldu dan Fre (2019) yang menjelaskan bahwa pendapatan rumah tangga yang rendah memiliki

pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian Rani dan Furrer (2016) juga menjelaskan bahwa status pekerjaan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terselubung dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana upaya pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan pelatihan ketrampilan dan dikaitkan dengan kebutuhan dunia kerja.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hal ini mengartikan bahwa naiknya pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk tidak diikuti dengan naiknya ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Sedangkan Jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hasil tersebut mengartikan bahwa naiknya jumlah penduduk dapat menurunkan angka ketimpangan pendapatan masyarakat dalam suatu daerah. Selain itu variabel tingkat pengangguran terselubung berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019. Hasil tersebut mengartikan bahwa setiap kenaikan tingkat pengangguran terselubung akan diikuti dengan tingkat ketimpangan pendapatan di Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2013-2019.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta : UPP STIM TKPN.
- Alam, S. *Ekonomi. Jilid 2*. 2007. Esis : Jakarta.
- Chapra, Umer. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Gema Insani Press : Jakarta.
- Baltagi, B. H. (2005). *Econometric Analysis of Panel Data. Ed.3*. Third Edition . John Wiley & Sons.
- Widarjono. A. (2016). *Statistika Terapan Edisi Pertama*. Yogyakarta : STIM YKPN.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. 2005. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Gujarati, D. N. (2013). *Dasar-Dasar Ekonometrika, Edisi Kelima*. Jakarta : Salemba Empat.
- Juanda, B., & Junaidi. (2012). *Ekonomi Deret Waktu*. Bogor : IPB Press.
- Sastra, Eka. (2017). *Kesenjangan Ekonomi Mewujudkan Keadilan Sosial Di Indonesia*. Jakarta Selatan : PT Mizan Publika.
- Mankiw, N. G. (2013). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Salemba Empat.
- Todaro, M. P., & Smith. S. C. (2006). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kesembilan. Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.
- Said, Rusli. (2001). *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan sosial.
- Sukirno, Sadono. (2006). *Ekonomi Pembangunan : Proses, masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Badak Pusat Statistik (BPS). (2019). Rasio Gini Pada Daerah Dengan Ketimpangan Tertinggi. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Tambunan, T., TH. (2001). *Perekonomian Indonesi : Teori Dan Temuan Empiris*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith. S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Kedelapan. Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Yamin, S., Rachmah, L. A., & Kurniawan, H. (2011). *Regresi Dan Korelasi Dalam Genggaman Anda: Aplikasi Dengan Software SPSS, EvIEWS, MINITAB, Dan STATGRAPHICS*. Salemba Empat : Jakarta.

## **JURNAL**

- Adipuryanti, N. L., P., Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. XI. No.1. Hal. 20 -28.
- Ghozi, S., & Hermansyah, H. (2018). Analisis Regresi Data Panel Profitabilitas Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. *Jurnal Matematika*. Vol. 8. No. 1. Hal. 1-12.
- Rani, U., & Furer, M. (2016). Decomposing Income Inequality Into Factor Income Components : Evidance From Selected G20 Countries. *International Labour Office, ILO Research Paper*. No.15.
- Hartadi, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Jawa Tengah. *Skripsi Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Amri, K. (2017). Analisi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan : Panel Data 8 provinsi di Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen teknologi (EMT)*. Vol. 1. No. 1. Hal. 1-11.
- Dando, T. C., Benu, N. M., & Mangginsela, E. P. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Distribusi pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Minahasa. *AGRIRUD*. Volume 1. Nomor 1. Hal. 60-70.
- Pauzi, A., & Dewa, N. B. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Ketimpangan Pendapatan Distribusi Pendapatan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud*. Vol. 5. No. 6. ISSN : 668-691.
- Kim, Jong-Hee. (2016). A Study on the Effect of Financial Inclusion on the Relationship Between Income Inequality and Economic Growth. *Emerging Markets Finance and Trade*. 52. Hal. 498–512.
- Matondang, Z. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Jumlah Pengangguran Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Desa Palopat Matia Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru. *Ihtiyath*. Vol. 2. No. 2. Hal. 255-270.
- Lindiarta, A. (2014). Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang (1996-2013). *Jurnal Ilmiah*. Vol. 2. No. 2. Hal. 1-12.
- Arif, M., & Wicaksani, R. A. (2017). Ketimpangan Pendapatan Provinsi Jawa Timur dan Faktor-Faktor yang Memengaruhinya. *University Research Colloquium*. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Asipuryanti, N. L., P., Y., & Sudibia, I. K. (2015). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk yang

- Bekerja dan Investasi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Melalui pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *PIRAMIDA Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Vol. XI. No.1. Hal. 20 - 28.
- Damarik, A. M., Zulgani, & Rosmeli. (2018). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketimpangan Pendapatan Melalui pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*. Vol. 7. No. 1. ISSN: 2303-1255.
- Sugiyarto, G., Oey-Gardiner, M., & Triaswati, N. (2006). Labor Markets in Indonesia: Key Challenges and Policy Issues. *Labor Markets in Asia: Issues and Perspectives*. J. Felipe and R. Hasan, Palgrave Macmillan: 301 - 366.
- Teka, A. M., Woldu, G. T., & Fre, Z. (2019). Status and Determinants of Poverty and Income Inequality in Pastoral and Agro-Pastoral Communities: Household-Based Evidence From Afar Regional State, Ethiopia. *World Development Perspectives*. 15. ISSN : 100123.
- Damarjati, A. G. (2010). Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kesenjangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Kalalo, H.Y., Rotinsulu, T.O., & Maramis, M. T. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Inflasi di Indonesia periode 2000-2014. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol. 16. No.1. Hal. 706-717.
- Teka, A. M., Woldu, G. T., & Fre, Z. (2019). Status and Determinants of Poverty and Income Inequality in Pastoral and Agro-Pastoral Communities: Household-Based Evidence From Afar Regional State, Ethiopia. *World Development Perspectives*. 15. ISSN : 100123.

#### **UNDANG-UNDANG**

- Indonesia (2003). Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.13/Men/2013 Tentang Tentang Ketenagakerjaan. Jakarta : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#### **WEB**

- <http://bappeda.jogiaprov.go.id>.
- <https://money.kompas.com/read/2020/07/15/213900326/yogyakarta-masih-jadi-provinsi-dengan-ketimpangan-tertinggi?page=all>.